

PENGEMBANGAN E-PLANNING BERBASIS WEBSITE PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Adelia Miranda^a, Novia Kencana^b, M.Qur'anul Kariem^c

^{a,b,c} Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang
E-mail: 2018610014@students.uigm.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di era globalisasi menjadi semakin cepat dan berkembang setiap sektor dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan sistem perencanaan (*e-Planning*) guna menerapkan *Good Governance* dalam menjalankan urusan pemerintahannya adalah Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan e-planning berbasis website pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang. Penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-planning di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Palembang telah mencapai tahapan transaksi, yang disebabkan karena masyarakat masih belum memiliki akses untuk penggunaan website e-planning itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak dapat melihat proses hingga hasil dari perencanaan pembangunan Kota Palembang melalui website e-planning tersebut. Lebih jauh transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih dinilai semu karena partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam penggunaan website e-planning itu sendiri. Pemerintah harus memberi masyarakat kewenangan untuk dapat mengakses website E-Planning agar dapat melihat proses hasil dari Perencanaan pembangunan Kota Palembang melalui website e-planning tersebut. Seharusnya badan perencanaan pembangunan daerah kota Palembang lebih transparan dan akuntabel dalam mewujudkan E-government.

Kata Kunci: *E-planning, Pengembangan, Pembangunan Daerah*

DEVELOPMENT OF WEBSITE-BASED E-PLANNING AT THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY OF PALEMBANG CITY

ABSTRACT

Technological developments in the era of globalization are becoming increasingly fast and every sector is required to adapt to technological developments today. One of the cities in Indonesia that has implemented a planning system (*e-Planning*) to implement *Good Governance* in carrying out its government affairs is Palembang City. The purpose of this study was to find out how the development of website-based e-planning at the Regional Development Planning Agency of Palembang City. The research was conducted at the City Regional Development Planning Agency using qualitative research methods. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation with research indicators, namely according to the Gartneer group in Indrayani (2020:22) e-government development can be carried out through four stages, namely: the presence stage, the interaction stage, the transaction stage and the transformation stage. The results of the study indicate that the development of e-planning at the Palembang Regional Development Planning Agency has reached the transaction stage, which is due to the fact that people still do not have access to the use of the e-planning website itself. So that the public cannot see the process to the results of the Palembang City development planning through the e-planning website. So that transparency in the regional development planning process is still considered false because community participation has not been optimal in the use of the e-planning website itself. The government must give the public the authority to be able to access the E-Planning website in order to see the process results from the Palembang City development planning through the e-planning website. The Palembang city regional development planning agency should be more transparent and accountable in realizing e-government.

Keywords: *E-planning, Development, Regional Development*

* Corresponding Author. Tel : Adelia Miranda
E-mail: 2018610014@students.uigm.ac.id

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang pengembangan E-Planning berbasis website pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang. Perkembangan teknologi di era globalisasi yang menuntut kecepatan dan perkembangan setiap sektor untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang menjadi tolak ukur perubahan ke arah yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Dalam ranah dunia politik dan pemerintahan dikenal dalam suatu konsep *e-Government*, yaitu suatu sistem teknologi informasi pemerintah; Secara sederhana, *e-government* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya, *e-government* bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat melalui layanan elektronik (online).

Tujuan pengembangan *e-Government* di Indonesia menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* disebutkan tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan diimplementasikannya *e-Government* di Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi

perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* disebutkan tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan diimplementasikannya *e-Government* di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government*.

Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi *e-Government*. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem

manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan cara :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi;
- b. Membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah berkerja secara terpadu, untuk menyederhanakan akses kesemua informasi layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam birokrasi pemerintah yang dapat disebut dengan *e-Government* atau pemerintahan elektronik. Pengembangan *e-Government* merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi di suatu negara, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi. Setiap instansi pemerintahan kini telah memiliki website resmi dalam upaya keterbukaan informasi kepada publik. Informasi-informasi yang disampaikan dalam website resmi akan selalu diupdate oleh setiap instansi yang bersangkutan. Sehingga hal ini mempermudah masyarakat dalam pencarian informasi publik yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor instansi tersebut.

Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah yang melaksanakan proses transformasi menuju *e-Government*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stake holder nya baik masyarakat maupun kalangan bisnis dan industri;
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
- c. Mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi;

- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru;
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat informasi yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi;
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara demokrasi.

Kemajuan teknologi informasi memang telah berubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merevolusi cara hidup masyarakat bergeser dari masyarakat industri kepada masyarakat yang berbasis pengetahuan.

Di Indonesia, aplikasi *E-Government* telah diatur sejak tahun 2001 dengan Keputusan Presiden Nomor 6 tentang Telekomunikasi (Telekomunikasi, Media dan Informatika). Selanjutnya, bentuk tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* mengharuskan pemerintah daerah Indonesia untuk mematuhi kebijakan tersebut.

Layanan elektronik tersebut meliputi monitoring dan evaluasi elektronik (*e-monev*), perencanaan elektronik (*e-planning*), surat, ketersediaan online seperti website. Setiap program memiliki misi tersendiri dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti menganalisis salah satu program *E-Government* yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang. *E-Planning* adalah perancangan perangkat lunak elektronik dan bagian dari *E-Government*, disinkronkan dengan peraturan pemerintah untuk memudahkan, mempercepat, akurat dan mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis

(Renstra), Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja).

Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah memperkenalkan sistem perencanaan (*e-planning*). Bagi Bappeda, *E-Planning* merupakan alat untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Implementasi *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Palembang telah berlangsung sejak tahun 2015.

Berdasarkan dasar hukum Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Palembang dengan *E-Planning*. Rencana elektronik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Palembang dapat diakses di <http://bappedalitbang.palembang.go.id/>.



Profil Website Bappeda
(Sumber : Oleh Penulis,2021)

Untuk keperluan *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang, saat ini Bappeda menggunakan *E-Planning*, yaitu sistem informasi perencanaan yang memandu proses perencanaan interaktif. Interaktif adalah proses pengajuan proposal dari kecamatan ke SKPD melalui *e-Planning*.

Proses perencanaan dengan menggunakan *E-Planning* dibagi menjadi beberapa tahapan diantaranya proses pengaksesan sistem *E-Planning*. Hal ini

dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana user/operator dapat mengakses website *E-Planning* Kota Palembang dengan menggunakan username dan password. Mengaksesnya menyiapkan draft pertama rencana kerja (RENJA).

Hal ini mengacu pada norma Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam memasukkan usulan rencana kegiatan/program OPD untuk tahun kerja. Tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dengan menggunakan OPD RENJA merupakan hasil masukan dari usulan kegiatan/program MUSRENBANG (teknis/nonteknis) yang dilakukan oleh pengguna/operator dan secara otomatis elektronik.

Tahap distribusi cap indikator adalah tahap perencanaan aturan cap untuk memandu pembuatan RENJA. Tahap OPD RENJA adalah tahap review kegiatan/program yang diusulkan sebagai hasil sinkronisasi antara RENJA dan MUSRENBANG, serta usulan kegiatan/program hasil sinkronisasi antara RENJA dan MUSRENBANG di bawah pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kota Palembang.

Hasil OPD RENSTRA sesuai dengan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fase Integrasi Prinsip Utama (POKIR) adalah fase yang terintegrasi melalui website *e-planning*. Pada tahap awal proses *E-Planning* ini, yaitu penerbitan SK Walikota tentang RKPD Kota Palembang dan penerbitan SK Walikota Palembang tentang perubahan RKPD, rencana pembangunan Kota Palembang berpuncak pada SK Dirjen SKPD Renja tentang perubahan. Jika ada perubahan RKPD dan Renja.

Namun dalam penelitian ini, peneliti fokus melihat bagaimana perkembangan perencanaan elektronik berbasis web di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Palembang berlangsung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga perlu dikembangkan secara kelembagaan untuk melaksanakan perencanaan partisipatif dengan memperdalam keterlibatan masyarakat.

Penelitian terkait *E-Planning* sejati telah banyak dilaksanakan oleh berbagai peneliti lainnya. Juniawan (2019) menyatakan bahwa *E-Planning* berperan pada fase 0 (persiapan), dalam mengumpulkan data dan informasi pembangunan yang ditetapkan oleh peraturan, fase 2 (strategi) pada saat pemasukan dan verifikasi usulan Musrenbang RPJMD, serta fase 4 (integrasi), yaitu mengintegrasikan misi, tujuan, sasaran, sampai pada program daerah dengan program pada Renstra Perangkat Daerah.

Dalam hal ini faktor pendukung dan penghambat yang muncul adalah faktor teknis (infrastruktur TIK, keamanan, output dan fitur sistem, SOP, dan pelatihan teknis) dan faktor sosial/ organisasi (komitmen pimpinan, budaya kerja, komunikasi dan SDM pelaksana). Berikutnya, Sukarno (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan tata kelola sistem *eplanning* telah memberikan dan meningkatkan suatu jaringan informasi dari alur perencanaan pembangunan suatu daerah. Dengan adanya pemanfaatan dari penerapan sistem *E-Planning* tersebut, maka akan mempermudah akses dalam menginput data serta mengolahnya.

Penerapan *E-Planning* juga merupakan konsekuensi yang harus di jalankan oleh pemerintah daerah dalam upaya mempercepat transaksi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan *E-Planning* di Bappeda Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah bentuk implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi. Sistem *e-planning* ini kemudian diberi nama Rencanaku. Penyusunan *E-Planning* Rencanaku ini belum bisa menginput keseluruhan alur

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo. Rencanaku hanya bisa untuk menginput Renstra dan Renja saja terutama pada Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

Namun, dengan hadirnya *E-Planning*, dapat memudahkan proses pekerjaan, mengefisienkan waktu, dan akan mengefektifkan program yang akan dikerjakan. Hal ini juga berlaku di BAPPEDA Kulon Progo. Setelah menerapkan *E-Planning*, BAPPEDA Kulon Progo mengaku mendapat berbagai manfaat, salah satunya adalah program yang sudah direncanakan dari jauh jauh hari, saat pelaksanaannya berjalan dengan baik, hal ini membuktikan bahwasanya perlu perencanaan terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu.

Diana (2021) menyatakan bahwa penerapan sistem *E-Planning* dalam program pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini belum efektif karena belum memenuhi semua variable pengukuran efektivitas menurut Duncan. Adapun variabel yang tidak terpenuhi adalah variabel pencapaian tujuan yaitu waktu capaian dan variabel adaptasi yaitu pengembangan kemampuan dan juga sarana dan prasarana. Variabel-variabel yang tidak terpenuhi inilah yang kemudian menjadi faktor penghambat atau kendala BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menerapkan sistem *E-Planning*.

Selanjutnya, Mait, Lumolos, dan Monintja (2020) menyatakan bahwa pada sistem penerapan *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah salah satu hal yang perlu di perhatikan oleh BAPPEDA Sulut yaitu Sumber Daya Manusia yang nantinya akan mengelola sistem *E-Planning* ini agar supaya bisa berjalan dengan baik. Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting bagi aparat pemerintah, terutama dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Sumber daya manusia merupakan unsur jauh lebih penting dari sumber-sumber lainnya yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dari berbagai sasaran yang ingin dicapainya. Lebih jauh, yang menjadi masalah juga pada system penerapan *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu belum adanya peraturan daerah yang menunjang maupun mendorong dalam proses penerapan sistem ini artinya belum ada kepastian hukum pada system penerapan *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam Penerapan sistem *E-Planning* ini juga yang harus dipastikan yaitu kesiapan anggaran, karena banyak keterlibatan pihak-pihak yang ada dalam penerapan system ini, namun nyatanya anggaran atau keuangan yang ada belum bisa memadai artinya belum cukup untuk pembiayaan penerapan system ini. Namun BAPPEDA Sulut sendiri tetap akan mengoptimalkan masalah anggaran ini, agar supaya proses penerapan sistem *E-Planning* ini bisa berjalan dengan baik.

Terakhir, Adriani (2022) menyatakan bahwa perencanaan penyusunan pembangunan daerah dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi secara optimal badan perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai bersama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia melakukan implementasi kebijakan publik dengan penggunaan aplikasi *E-Planning* sebagai sarana untuk membantu memudahkan pekerjaan dalam menyusun rencana pembangunan daerah untuk instansi terkait pemerintahan Kota Dumai bersama dengan organisasi perangkat daerah dan Bappeda Kota Dumai. Implementasi ini telah menjadi efektif dan bermanfaat serta terus dilakukan perbaikan dalam pengelolaannya agar lebih maksimal.

Namun pada kenyataannya, dalam konteks penelitian ini, setelah layanan online tersedia masih banyak masyarakat yang

belum mengetahui tentang layanan teknologi informasi yaitu layanan perencanaan pembangunan dengan menggunakan *E-Planning*. Pemerintah belum sepenuhnya memenuhi yang masyarakat inginkan dari perencanaan pembangunan tersebut.

Peningkatan pelayanan ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah dengan masyarakatnya, pembangunan tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan dari masyarakat, maka dari itu pemerintah membuat suatu program yang namanya *E-Planning*.

Supaya masyarakatnya juga bisa menyampaikan keluhan-keluhannya melalui website ini agar bisa ditangani secara langsung oleh pemerintah. Sayangnya, pemerintah kota tidak memiliki wawasan tentang proses hingga hasil dari rencana pembangunan Kota Palembang. Artinya, transparansi proses penataan ruang masih dihargai, karena partisipasi pemerintah kota belum optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Palembang khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini menurut Gatneer Group dalam Indrayani (2020 : 22) pengembangan *E-Government* bisa dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu : Tahapan *presence*, Tahapan *interacition*, Tahapan *transaction* serta tahapan *transformation*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-

prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu a). Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung, memahami peristiwa yang terjadi dilapangan. b). Dokumentasi, dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelitian secara tertulis dalam bentuk dokumen yang dianggap penting dan relevan dengan masalah penelitian dalam bentuk dokumen buku, laporan dll. Dengan demikian itu akan dieksekusi untuk mendapatkan data sekunder. c). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur karena pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan pada subjek telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pewawancara.

Setelah data di kumpulkan dengan melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan data yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni analisis data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran yang baru.

Adapun cara berfikir dengan menggunakan berfikir secara deduktif dan induktif. Deduktif, yakni berfikir dari hal-hal yang umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, induktif, yakni berfikir dari hal-hal yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam hal subjek, penelitian ini menggunakan staff Bappeda Kota Palembang itu sendiri selaku instansi terkait serta

masyarakat umum, untuk diwawancarai guna mendapatkan data dan informasi yang relevan terkait bagaimana pengembangan *E-Planning* pada Bappeda Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus sudah samapi mana tahap *E-Planning* berkembang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang. Data dikumpulkan langsung dari karyawan dan masyarakat umum.

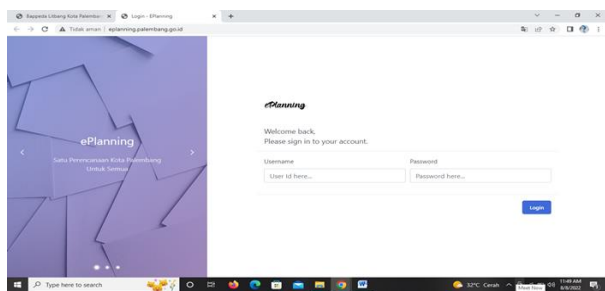
Berdasarkan teori Gartner Group, pengembangan e-government dapat terjadi melalui empat tahapan: Tahapan *presence*, Tahapan *interacition*, Tahapan *transaction* serta tahapan *transformation*. Untuk memperjelas hasil dalam penelitian ini akan dihubungkan dengan tahapan-tahapan dari teori menurut Gartner Group dalam Indrayani (2020:22) yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Tahapan *Presence* (Kehadiran)

Tahapan kehadiran adalah komunikasi pasif satu arah antara pemerintah dan masyarakat umum dan mereka yang tertarik menggunakan teknologi Internet seperti situs web. Berdasarkan tahapan *presence* terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ketersediaan layanan website dan tersedianya layanan informasi dan didukung dengan dokumen-dokumen public.

Pada indikator ini peneliti telah melakukan wawancara bersama Bapak Putra selaku Pegawai di Bappeda. Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, dan menanyakan mengenai. Apakah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah memiliki ketersediaan website *e-Planning*, mendapatkan hasil berupa :

“Iya website tersebut telah ada, dibuat oleh konsultan pihak 3, Bappeda dan kominfo. pengembangan website ini dibagi 2 kali yaitu generasi 1 dan generasi 2 berupa pembaruan website. Untuk sekarang tidak ada kendala dalam pengembangan website tersebut.”



Gambar Tampilan Website E-Planning

Hasil riset dilapangan menunjukkan bahwa ketersediaan layanan informasi dan dokumen-dokumen publik yang ada di website *E-Planning* milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk saat ini sudah dapat mengakses informasi dan dokumen tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dokumen yang sudah tersedia di website tersebut seperti dokumen Renja, RKPD dan dokumen lainnya. Namun hal ini tidak selaras dengan pendapat dari masyarakat yang mengatakan belum banyak yang mengetahui website *E-Planning* ini sendiri.

Untuk itu dalam hal ini menurut pemahaman peneliti website *E-Planning* yang disediakan oleh pemerintah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah cukup baik namun belum efektif untuk memberi tahu masyarakat terkait dokumen pemerintah. Hal ini dirasakan belum transparan karena belum adanya pengoptimalisasikan terkait pengetahuan masyarakat yang seharusnya, juga perlu diperhatikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk itu dalam hal ini menurut pemahaman peneliti website *E-Planning* yang disediakan oleh pemerintah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah cukup baik namun belum efektif untuk memberi tahu masyarakat terkait dokumen pemerintah. Hal ini dirasa belum transparan karena belum adanya pengoptimalisasikan terkait pengetahuan masyarakat yang seharusnya, juga perlu diperhatikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Tahapan *Interact* (Berinteraksi)

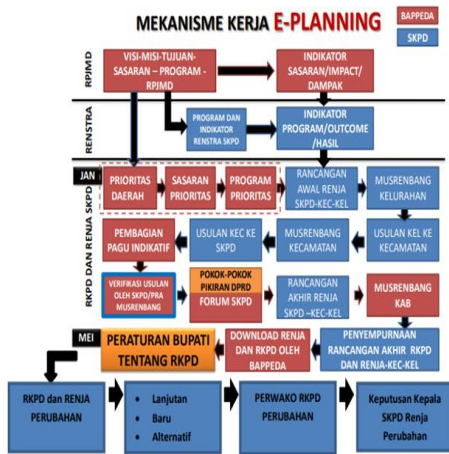
Interaksi adalah jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi satu sama lain. Gagasan efek dua arah penting dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah dalam hal tujuan dan efek.

Interaksi memiliki arti yang berbeda dalam berbagai bidang ilmu. Berdasarkan tahapan *Interact* di bagi menjadi 3 bagian, yaitu data base yang dapat diakses, kemampuan untuk mengumpulkan umpan balik publik melalui situs web atau alamat email, konten situs web yang menarik, atau konten yang didukung oleh staf pengelola situs web itu sendiri.

Dimana pada indikator ini peneliti telah melakukan wawancara bersama Ibu Eka selaku Kasubid bidang perencanaan dan perdanaan. Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, mengenai apakah website *e-planning* sudah menyediakan database yang bisa diakses, mengatakan bahwa :

“Iya sudah ada di website e-planning itu sendiri yang dapat diakses oleh masyarakat. Disana sudah ada database yang bisa diakses seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan lainnya.”

Hasil riset pada pembahasan ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang telah menyediakan website untuk menampung setiap tanggapan atau usulan-usulan yang ada pada masyarakat, seperti perbaikan jalan, pembangunan Kantor Lurah Dua Belas Ulu, pengedaman anak sungai agas dan lain sebagainya. Dari beberapa usulan tersebut ada yang sudah disetujui, ada juga yang masih diverifikasi.



Gambar Alur e-Planning

Menurut informasi dari Bappeda Litbang Kota Palembang, pada saat melakukan perubahan RPKD dan RENJA, langkah kerja untuk memasukkan perubahan RENJA adalah:

1. Salin aktivitas RENJA murni dan modifikasi RENJA.
2. Dari aktivitas mana nolisasi terjadi.
3. Melonggarkan aturan untuk kegiatan yang dihentikan sementara.
4. Tingkatkan anggaran aktivitas yang ditambahkan uang.
5. Masukkan kegiatan yang termasuk dalam APBD tetapi tidak dalam RENJA. Bahkan jika
6. Memasuki kegiatan baru yaitu kegiatan yang tidak termasuk dalam RENJA akhir atau APBD murni, memiliki batas yang cukup dan dapat diselesaikan dan dilaksanakan dalam waktu 3 bulan (harus dikonsultasikan dengan BAPPEDA).

Di bawah ini adalah tiga jenis kegiatan dalam perencanaan wilayah.

1. Program dan kegiatan yang sedang berjalan atau sedang berjalan, yaitu satu tahun ke depan dari tahun yang direncanakan yang tertuang dalam Renstra-SKPD.
2. Cara lain, yaitu program dan kegiatan SKPD, analisis menunjukkan di seluruh SKPD dan di daerah, pelaksanaannya harus digeser untuk

mempengaruhi pertimbangan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercakup dalam Renstra-SKPD. Berdasarkan kriteria berikut ini:

- a. Tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
- b. Mempercepat pencapaian target SKPD dalam Renstra.
- c. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah.
- d. Jika kegiatan yang dilakukan sebelum penyelesaian tidak menghasilkan keluaran dan hasil yang sesuai dengan tujuan Renstra SKPD.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat mengambil garis besar bahwa isi atau konten yang terdapat pada website *E-Planning* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berisikan data-data dan informasi dokumen-dokumen kota Palembang seperti Renja, RPKD dan Data Penduduk seperti peta penyebaran penduduk.

Namun pada website *E-Planning* tidak dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum, yang dapat mengakses hanyalah orang-orang yang telah memiliki akun seperti pegawai badan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.

Dalam hal ini, rencana pembangunan daerah harus dikembangkan lebih lanjut lagi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang. Agar dokumen yang ada di website tersebut dapat lebih lengkap lagi dan seluruh dapat diakses oleh masyarakat secara transparan. Website tersebut dapat membuat dokumen Kota Palembang menjadi lebih terorganisir dan tertata lagi.

3. Tahapan *Transaction* (*Transaksi*)

Pada tahapan transaksi, berfokus pada hubungan sistem internal pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan pelayanan secara langsung atau online. Tahapan *Transaction* ini, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tersedia layanan atau transaksi online dengan masyarakat sebagai pengguna, dan menggunakan layanan tersebut gratis (tanpa dipungut biaya pemakaian).

Dimana pada indikator ini peneliti telah melakukan wawancara bersama Bapak Ibnu selaku Pegawai di Bappeda. Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Apakah masyarakat dapat menggunakan website e-planning untuk mengakses pelayanan, mendapatkan hasil berupa:

“Iya sudah bisa masyarakat untuk mengakses layanan melalui website tersebut. Mereka bisa langsung mengakses dan memasukkan email dan password.”

Sesuai dengan hasil temuan dilapangan, maka dapat di analisis bahwa untuk mengakses website *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang ini tidak di pungut biaya atau dapat dikatakan gratis baik instansi atau pegawai pemerintah yang ingin mengakses website tersebut.

Maupun masyarakat yang memerlukan dokumen di dalam website tersebut. Hal ini di rasakan sangat ini sudah baik dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang.

4. Tahapan *Transformation* (*Transformasi*)

Transformasi adalah proses perubahan bertahap, mencapai tahap akhir. Ini adalah perubahan yang dibuat dengan bereaksi terhadap pengaruh elemen eksternal dan internal, mengarahkan perubahan dari bentuk yang diketahui sebelumnya melalui proses berulang perkalian atau duplikasi.

Berdasarkan tahap transformasi ini, dibagi menjadi dua bagian. Artinya, *one door service* dengan akses atau kemampuan membangun relasi dan berkolaborasi dengan

pihak lain. Tahap ini berarti fase yang bertujuan untuk mentransformasikan birokrasi pemerintah untuk membentuk pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Dimana pada indikator ini peneliti telah melakukan wawancara bersama Ibu Eka selaku Kasubid bidang perencanaan dan perdanaan. Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Apakah terdapat kontak yang di akses oleh masyarakat ke Badan perencanaan pembangunan daerah pada website tersebut, Mendapatkan hasil berupa:

“Untuk saat ini kita dari pihak badan perencanaan pembangunan daerah belum menyediakan kontak personal di website tersebut. Namun kita menyediakan kolom masukan dan saran yang dapat dilihat atau diakses oleh masyarakat di website badan perencanaan pembangunan daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan website tersebut terdiri dari masyarakat, OPD lainnya seperti kecamatan, kelurahan, dan anggota DPRD serta Diskominfo sebagai instansi yang membuat website *E-Planning* ini sendiri.

Dalam hal ini peneliti merasa bentuk koordinasi dalam pelaksanaan website. Ini sendiri sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari keterlibatannya beberapa instansi didalam pelaksanaan website sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan Pengembangan *E-Planning* Berbasis Website Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang. Saat ini pengembangan *E-Planning* tersebut sudah sampai pada tahapan *Transaction*. Dengan melalui teori yang saya ambil dalam penelitian ini menurut Gartneer Group dalam Indrayani (2020:22) dimana dalam teori itu terdapat 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahapan *Presence*, Tahapan *Interaction*, Tahapan *Transaction* dan Tahapan *Transformation*. Diantara keempat teori tahapan tersebut

sudah diuraikan masing-masih di bab sebelumnya sehingga peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan temuan penelitian dilapangan.

Pada tahapan *Presence* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang sudah menyediakan website dan juga sudah pengembangan website tersebut hingga saat ini. Website tersebut dibuat oleh Kolsultan Pihak Ke 3, Bappeda Itu Sendiri dan Kominfo. Menurut pendapat pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk saat ini website *E-Planning* sudah tidak memiliki kendala lagi. Tidak hanya itu saja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga sudah menyediakan layanan informasi dan dokumen-dokumen publik yang dapat diakses langsung melalui website *e-planning* tersebut. Hal ini dapat di lihat dari beberapa dokumen yang sudah tersedia di website tersebut seperti dokumen Renja, RKPD dan dokumen lainnya.

Selanjutnya pada tahapan *Interaction* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang juga telah memiliki database yang bisa di akses dalam website *e-planning* tersebut. Terdapat data-data seperti Infrastruktur, Pendidikan, Ekonomi Kota Palembang dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang telah menyediakan website untuk menampung tanggapan atau usulan-usulan masyarakat. Seperti Perbaikan Jalan, Pembangunan Kantor Lurah Dua Belas Ulu, Pengedaman Anak Sungai Agas dan lain sebagainya.

Dari beberapa usulan tersebut ada yang sudah disetujui, ada juga yang masih diverifikasi. Setiap tanggapan atau usulan tentang perencanaan pembangunan daerah dari masyarakat disampaikan secara bertahap dari Musrenbang Kelurahan, kemudian ke Musrenbang Kecamatan, dan dirapatkan di forum OPD untuk disampaikan ke OPD terkait dengan usulan tersebut.

User yang dapat menggunakan akses *E-Planning* ini ada Masyarakat, Kelurahan, Kecamatan, OPD dan anggota DPRD (Pokir). Jumlah OPD yang terdapat kurang lebih 51 OPD setiap OPD mempunyai nama-nama masing-masing. Untuk kolaborasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Diskominfo itu hanya terkait dengan kualitas pelayanan saja karena dalam membuat website tersebut Diskominfo juga terlibat salah satu pihak yang membuat website tersebut.

Kemudian pada Tahapan *Transaction* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang untuk saat ini website *e-planning* yang dimiliki sudah dapat diakses oleh masyarakat dengan cara menggunakan email dan password atau akun diperbolehkan untuk mengakses website tersebut. Namun menurut pendapat masyarakat hingga saat ini masyarakat belum banyak mengetahui website tersebut dan masih sangat sedikit masyarakat yang mengakses website tersebut. Sehingga transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih dinilai semu karena partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Adapun saran yang ingin disampaikan mengacu pada hasil pembahasan dan kesimpulan, guna berlanjutan pengembang *E-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan pembangunan daerah Litbang Kota Palembang, perlu Melakukan sosialisasi tentang penggunaan *E-Planning* dikalangan masyarakat.
2. Masyarakat diberi kewenangan untuk dapat mengakses website *E-Planning* agar dapat melihat proses hasil dari Perencanaan pembangunan Kota Palembang melalui website *E-Planning* tersebut. Seharusnya badan perencanaan pembangunan daerah kota palembang lebih transparan dan

akuntabel dalam mewujudkan *E-Government*.

3. Perlu adanya penyempurnaan dan pemeliharaan sistem guna keberlangsungan dan keberlanjutan penerapan sistem *E-Planning*.
4. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dengan cara mengikuti sosialisasi pengenalan dan tata cara menggunakan *e-planning*. Sehingga apa yang diharapkan Pemerintah dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, JW (2016). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Perajar
- Dwijowijoto, Riant Nugroho (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Indrajit, Eko, (2006) *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM
- Indrajit, Richardus E. (2007). *Electronic Government in action*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Indrayani Etin (2020). *E-Government: Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia*. Sumatra Barat: LPP Balai Insan Cendekia
- Mahi, Ali Kabul, M.S (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori & Politik*. Jakarta: Kencana
- Napitupulu, Darmawan, dkk. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategis Dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis
- Ridwan, Nasar Baso (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung: ALFABETA
- ### Jurnal
- Askya, Hiriyaatul. (2018). Implementasi E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Implementasi Program e-Tax Pajak Restoran di Kota Malang) (Makalah Universitas Airlangga).
- Adriani, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Wilayah di Kota Dumai (Studi Kasus Aplikasi E-Planning). *Jurnal Niara*, 14(3), 275-283.
- Harahap, D.R., Badaruddin, B., & Harahap, R.H. (2021). Efektivitas pengenalan sistem E-Planning dalam rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. *Perspektif*, 10(1), 76-87.
- Junior One, WD (2020). Sistem perencanaan pembangunan terpadu dengan menerapkan *e-planning* (Studi Kasus Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 285-293.
- Koesharijadi K, Hardiyansyah H, dan Akbar M (2019). Implementasi kebijakan *eGovernment*, keterlibatan, evolusi perangkat, dan dampak pada kinerja layanan publik. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 39-45.
- Mait, AS, Lumolos, J., dan Monintja, D. (2020). Analisis penerapan sistem *e-planning* dalam perencanaan

- pembangunan daerah (studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Ningsih, V., Sari, RN., & Rasuli, M. (2018). Analisis Penerapan E-Planning dan E-Budgeting di Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Benkalis). *Jurnal Ekonomi*, 26(2), 18-31.
- Nugroho, T.W.A. (2017). Analisis layanan publik e-government di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Akademik Kebijakan Hukum*, 10(3), 279-296.
- Pramono, B. (2019). E-Government Implementation Evaluation in Local Government Agency in Pontianak Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(1), 48-60.
- Purwandani, S., Maesaroh, M., & Rihandoyo, R. (2012). Analisis Penerapan Electronic Government Di Kabupaten Pati. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 91-100.
- Prasetyo Alfian Adi, Herbasuki Nurcahyanto, Rihandoyo. Analisis Pengembangan E-Government di Kota Semarang (Studi Website Resmi Kota Semarang). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Rubyanto, R. (2018). Implementasi Kebijakan e-Government pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Publik*, 2(1).
- Rahmawati, A., Ansari, M. I. & Parawangi, A. (2020). Implementasi pedoman program pengembangan produk di kawasan strategis Kabupaten Bone. *Penelitian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Negara (KIMAP)*, 1(1), 218-231.
- Soekarno, M. (2020). Implementasi kebijakan e-planning di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo. Pada SENASTER "Seminar Riset Teknologi Terapan Nasional" (Vol.1, No.1).
- Skripsi**
- AL HAQ, A. S., & Murod, C. (2018). Perencanaan Dan Perancangan Redesain Kantor Bappeda Kota Palembang (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Avivi, R., Semil, N., & Marpaung, Z.S. (2019). Analisis Pengembangan e-Government (Penelitian Perencanaan Elektronik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan) (Makalah, Universitas Sriwijaya).
- Fajrina, S. N., Semil, N., & Marpaung, Z. S. (2019). Analisis Pengelolaan Website Dalam Penyampaian Informasi Kepada Publik Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- Nasution, M. A. (2020). Efektivitas Electronic Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah